

TAX AVOIDANCE: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA

Giawan Nur Fitria

Universitas Mercu Buana

Email: giawan.nur@mercubuana.ac.id

Riaty Handayani

Universitas Mercu Buana

Email: riaty.handayani@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

This purpose of this study is to examine the effect of Return On Asset (ROA), Company's Size, Audit Committee and Proportion of Independent Directors to Tax Avoidance. Tax Avoidance is measured using the cash effective tax rate (CETR). This study is an empirical research with the purposive of sampling techniques in data collection. Secondary data obtained from financial statement and annual report listing on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2017. The sample was 21 manufacture companies on consumption sector listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2017. Multiple regression analysis was conducted using SPSS version 23.00 for windows. The test results showed of four hypotheses proposed hypothesis two accepted hypothesis. And the amount of determination of the case (adjusted R²) of 12,5%.

Key words: *Return On Asset, Company's Size, Audit Committee, Proportion of Independent Directors and Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Mengoptimalkan penerimaan pajak membutuhkan kerja keras tidak hanya dari pihak otoritas perpajakan tetapi juga dibutuhkan kerjasama yang baik dari wajib pajak. Pendapatan Negara terbesar masih didominasi oleh pajak yaitu mencapai 85.4% dari total pendapatan negara. Dengan target penerimaan perpajakan dalam APBN sebesar Rp1.618,1 triliun pada tahun 2018 (kemenkeu.go.id). Dilihat dari efektivitas pemungutan pajak di

Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016, target penerimaan pajak tersebut sering mengalami penurunan. Berikut adalah tabel efektivitas pemungutan pajak di Indonesia :

Tabel 1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target Anggaran (Trilliun Rupiah)	Realisasi Anggaran (Trilliun Rupiah)	Efektivitas Pemungutan Pajak (%)
2012	1.016	980	96,48
2013	1.148	1.077	93,81
2014	1.246	1.146	92,04
2015	1.489	1.240	83,29
2016	1.539	1.284	83,47

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2017)

Pada tabel 1 diatas realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2012 hingga 2016 belum mencapai target dan prosentase efektivitas penerimaan pajaknya juga menurun. Padahal Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, seperti *tax amnesty*, perbaikan *system aplikasi pajak online* yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas Negara. Tantangan lain yang dihadapi oleh DJP dalam melakukan optimalisasi pajak yaitu penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Budiman, 2012).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia pada tahun 2014. DJP menyelidiki total penghasilan kena pajak pada periode itu sebesar Rp 603,48 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar

sehingga timbul kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp 49,24 miliar. Hal tersebut menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil. (www.kompas.com).

Tax avoidance merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak (Jacob 2014). Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dapat dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith & Skousen 1987 dalam Suandy 2001:7). Namun, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak yakni ingin memaksimalkan penerimaan sektor pajak yang progresif dan stabil guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan berdasarkan teori keagenan

akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat ditunjukkan melalui *Return on Asset* (ROA). ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih setelah pajak yang bisa diperoleh dari seluruh nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih (Kurniasih dan Sari 2013). ROA yang meningkat menunjukkan perusahaan mampu mengefesiesikan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan berhasil memanfaatkan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Semakin tinggi nilai aset yang dimiliki maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks (Rizal 2016). Nilai tinggi dan rendah nya asset perusahaan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari perusahaan dengan asset yang

tinggi cenderung dapat mengelola pajaknya dengan optimal dikarenakan terdapatnya sumber daya lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajaknya dan berlaku sebaliknya.

Pada umumnya *tax avoidance* digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pajak. Tindakan *tax avoidance* didukung karna lemahnya keberadaan *anti avoidance rules* dan sistem penghitungan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *Self Assesment*. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010). *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktik penghindaran pajak (Dharmapala 2006; Armstrong et al. 2013). Penelitian ini menngangkat dua komponen penting dalam corporate governance, yaitu komite audit dan komisaris independen.

Komite audit (*audit committee*) telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik (Swingly & Sukartha 2015). Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan

keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah 2014). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan dan mencegah adanya asimetri informasi. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang merupakan organ perusahaan yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif (Mershlythalia dan Lasmana, 2016). Didalam KNKG (2006) komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Puspita 2014). Waluyo (2017), meneliti *the effect of good corporate governance on tax avoidance* memiliki hasil bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan

yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo 2014).

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

TEORI KEAGENAN

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori *Agency* sebagai hubungan antara *agent* (manajemen) dan *Principal* (pemilik perusahaan) yang terikat dalam sebuah kontraktual. *Principal* memberikan tugas kepada agen untuk menyediakan pelayanan (jasa) bagi kepentingan *principal*. Dalam teori agensi dikenal adanya kontrak kerja yang mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaatnya secara menyeluruh.

Terdapat sisi negatif akibat asimetri informasi dan konflik kepentingan tersebut yang akan memacu *agent* untuk memaksimalkan utilitasnya. Dengan kata lain, terdapatnya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan, salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak.

TAX AVOIDANCE

Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan – hambatan yang terjadi pada upaya pemungutan pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan – pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dan kelemahan – kelemahan yang ada dalam aturan perpajakan. Irwan dan Farahmita (2012) mengutip Dyreng *et al* (2008) mengukur pajak efektif menggunakan pembayaran pajak secara kas sebagai proksi atas manajemen pajak. Dengan alasan tersebut penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* sebagai proksi *Tax avoidance*. CETR merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan.

RETURN ON ASSET (ROA)

Return On Asset digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki (Kasmir 2017:201).

UKURAN PERUSAHAAN

Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Ukuran perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan melalui total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Machfoedz 1994 dalam Kurnia dan Sari 2013).

KOMITE AUDIT

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai berikut :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris”. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”.

PROPORSI KOMISARIS

INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan

bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007). Proporsi jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (UU No. 33/POJK.04/2014 Pasal 20).

a. Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga laba yang diperoleh akan besar. Laba yang besar mengakibatkan pajak terutang yang semakin besar juga sehingga perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan atau meminimalkan pajak yang terutang. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rizal (2016), Fadilla (2017), Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan Suadarna (2014)

H1 : *Return On Asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political*

power theory). Hal tersebut sejalan dengan Kurniasih dan Sari (2013), Fadilla (2017), Irianto *et al* (2017)

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan melalui pengawasan manajerial yang dilakukan oleh komite audit. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir tindakan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suadarna (2014)

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

d. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen memiliki fungsi pengawasan dan tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka memiliki pengawasan yang semakin besar sehingga manajemen akan berhati-hati dalam

mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya *tax avoidance*. Dengan komposisi proporsi komisaris independen yang besar dalam fungsi pengawasan maka dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Diantari dan Ulupui

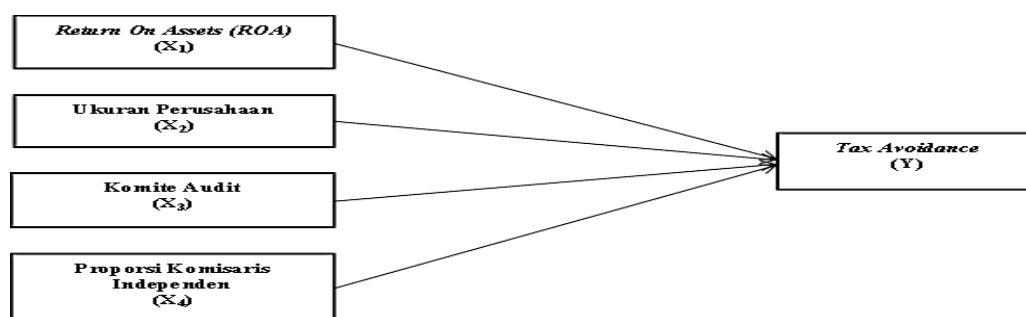
(2016), Maharani dan Suadarna (2014), Rachmitasari (2015).

H4 :Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut rerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian ini dijelaskan pada gambar

Gambar 1

Rerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan selama 5 tahun sehingga diperoleh sebanyak 105 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI yang diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id.

METODE ANALISIS DATA

Analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Analisis ini diolah menggunakan SPSS 23.00. Persamaan regresi linier berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Dengan keterangan :

- Y : *Tax Avoidance*
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- X1 : *Return On Aset (ROA)*
- X2 : Ukuran Perusahaan
- X3 : Komite Audit
- X4 : Proporsi Komisaris Independen

e : Error

Hasil Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil perhitungan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN statistic deskriptif :

Tabel 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	105	,0154	,6572	,143037	,1208541
SIZE	105	11,2029	13,9630	12,514088	,7315657
KA	105	0	1	,95	,214
PKI	105	,2000	,8000	,420351	,1221870
CETR	105	,0832	,7238	,298806	,1180742
Valid N (listwise)	105				

Sumber : *Output SPSS, data diolah 2018*

Variabel CETR memiliki rata-rata sebesar 0,2988. Artinya rata-rata perusahaan membayar pajak melalui kas lebih dari 29,88% dari nilai laba sebelum pajak perusahaan per tahun nya. Variabel ROA memiliki rata-rata 0,1430. Hal ini menunjukkan bahwa 14% perusahaan memiliki ROA yang tinggi atau ditemukan pada 15 dari 105 sampel penelitian. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata 12,51. Dengan nilai rata-rata tersebut dapat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sampel yang dianalisis cukup besar karena lebih mendekati nilai maksimum ukuran perusahaan. Variabel komite audit memiliki rata-rata 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa 95% perusahaan sampel memiliki 3 orang komite audit atau pada 100 dari 105 sampel penelitian sedangkan selebihnya anggota komite

auditnya kurang dari 3. Variabel proporsi komisaris independen memiliki rata-rata 0,42. Hal ini menunjukkan bahwa 42% perusahaan atau ditemukan pada 44 dari 105 sampel perusahaan memiliki proporsi komisaris yang tinggi.

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresidengan analisis statistic menggunakan uji kolmogrov-smirnov :

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas (Uji K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,10828926
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,974
Asymp. Sig. (2-tailed)		,299

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber :*Output* SPSS, data diolah 2018

Dari tabel 3 dapat dilihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,974 dengan signifikan (*Asymp.Sig. 2-tailed*) sebesar 0,299. Data signifikansi tersebut menunjukkan nilai nya lebih besar 0,05 ($0,299 > 0,05$). Dapat disimpulkan, model regresi dengan variabel dependen *tax*

avoidance memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolonieritas

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Berikut hasil uji multikolonieritas :

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	,759	1,317
	SIZE	,846	1,181
	KA	,907	1,102
	PKI	,720	1,389

a. Dependent Variable: CETR

Sumber :*Output* SPSS, data diolah 2018

Pada tabel 4 Nilai *Tolerance* dan nilai VIF dari variabel independen penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam model regresi ini karena mempunyai nilai *Tolerance* diatas 0,1 ($T > 0,1$) dan angka pada VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$).

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi setelah Transformasi Data

Model Summary ^a	
Model	Durbin-Watson
1	1,863

a. Predictors: (Constant), LAG_X4, LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2
b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : *Output* SPSS, data diolah 2018

Pada hasil uji autokorelasi tabel 5 setelah transformasi di dapat nilai DW=1,863 maka pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghazali, 2016:108 adalah $du < d < 4 - du$ sehingga persamaannya menjadi $1,783 < 1,863 < (4 - 1,783)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedesitas

Model regresi yang baik tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedesitas menggunakan uji Park :

Tabel 6
Hasil Uji Park

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7,781	5,455		-1,426	,157
ROA	-3,794	2,988	-,144	-1,270	,207
1 SIZE	,085	,467	,019	,181	,857
KA	-,379	1,544	-,025	-,246	,806
PKI	3,570	3,034	,137	1,176	,242

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber : *Output* SPSS, data diolah 2018

Setelah dilakukan uji Park didapatkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\alpha > 0,05$), maka hal tersebut konsisten dengan hasil uji Scatterplots bahwa tidak terjadi heteroskedesitas pada model regresi penelitian.

HASIL UJI HIPOTESIS

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien *determinasi* (R²) :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,399 ^a	,159	,125	,1104338

a. Predictors: (Constant), PKI, KA, SIZE, ROA

b. Dependent Variable : CETR

Dapat dilihat dari tabel 7 bahwa model summary besarnya adjusted R² adalah 0,125, hal ini berarti 12,5% variasi *tax avoidance* (CETR) dapat dijelaskan oleh variasi *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), komite audit (KA) dan proporsi komisaris independen (PKI).

Sedangkan sisanya 87,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (F)

Berikut hasil uji signifikansi simultan (uji F) :

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,230	4	,058	4,722	,002 ^b
	Residual	1,220	100	,012		
	Total	1,450	104			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), PKI, KA, SIZE, ROA

Dapat dilihat pada tabel 8 bahwa pada uji ANOVA atau F Test didapat nilai F sebesar 4,722 dengan nilai probabilitas 0,002. Seluruh variabel independen yaitu *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan

(SIZE), komite audit (KA) dan proporsi komisaris independen (PKI) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (CETR).

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (ROA, SIZE, KA dan

PKI) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (CETR) (Ghozali, 2016:97) Pengujian ini menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$).

Tabel 9

Hasil Uji Signifikansi Individual (t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,138	,188		,734	,465
1 ROA	-,390	,103	-,399	-3,794	,000
SIZE	,012	,016	,077	,773	,441
KA	-,065	,053	-,117	-1,215	,227
PKI	,292	,104	,302	2,794	,006

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : *Output* SPSS, data diolah 2018

Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 9, nilai signifikansi variabel *Return On Asset* (ROA) menunjukkan angka 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti dan berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* (CETR). Hasil analisis regresi pada tabel 9 menunjukkan bahwa secara statistik *return on asset* berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Hipotesis pertama (H₁) diterima.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal itu disebabkan perusahaan dengan ROA tinggi,

menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba besar dari total asset yang dimiliki tanpa melakukan efisiensi pajak dan adanya kemampuan perusahaan dalam membayarkan pajaknya. Perusahaan dengan ROA tinggi dapat dikatakan memiliki kinerja baik sehingga memiliki perputaran cash yang baik pula atau cash yang dimiliki semakin kecil dikarenakan manajemen perusahaan mampu mengelola atau melakukan pembayaran pajaknya melalui kas yang dimiliki sehingga tindakan *tax avoidance* (CETR) menurun. Namun, berlaku sebaliknya perusahaan dengan ROA yang rendah, maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 9, nilai signifikansi variabel Ukuran Perusahaan(SIZE) menunjukkan angka 0,441 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5% ($0,441 > 0,05$) yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* (CETR). Hasil analisis regresi pada tabel 9 menunjukkan bahwa secara statistik ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis kedua (H₂) ditolak**.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar asset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi perusahaan akan semakin kompleks sehingga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam waktu yang relative panjang. Perusahaan yang memiliki prospek baik dalam waktu yang panjang maka akan menarik perhatian fiskus secara kuat untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perusahaan tidak tertarik untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Selain itu tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar atau kecil berdasarkan asset yang dimiliki tidak akan mengubah ketentuan undang-

undang yang berlaku bahwa beban membayar pajak merupakan kewajiban setiap perusahaan dan tidak akan mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 9, nilai signifikansi variabel Komite audit(KA) menunjukkan angka 0,227 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5% ($0,227 > 0,05$) yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* (CETR). Hasil analisis regresi pada tabel 9 menunjukkan bahwa secara statistik komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis ketiga (H₃) ditolak**.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah minimal tiga orang komite audit dalam perusahaan yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tidak mendukung tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Banyak atau sedikitnya jumlah komite audit tidak juga memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Ketidakmampuan komite

audit dalam menjalankan tugas pengawasan sebagai pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaan terhadap struktur pengendalian internal dan kurangnya dukungan elemen-elemen lain dalam perusahaan yang menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan dengan baik sehingga praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat terdeteksi oleh komite audit.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 9, nilai signifikansi variabel Proporsi Komisaris Independen (PKI) menunjukkan angka 0,006 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5% ($0,006 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti dan berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* (CETR). Hasil analisis regresi pada tabel 9 menunjukkan bahwa secara statistik proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis keempat (H₄) diterima.**

Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (No. 33/POJK.04/2014 Pasal 20) yang mengatur jumlah komisaris independen wajib minimal 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris sangat berpengaruh sebagai fungsi monitoring dari

implementasi kebijakan direksi. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan suatu indikasi berhasilnya penerapan *corporate governance*. Semakin banyak komposisi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin efektif pengawasan baik dari manajemen dalam mengambil keputusan sesuai dengan konsep teori keagenan yang memberikan jaminan kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan cara menekan biaya-biaya perusahaan seefisien mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan meningkat pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Return on asset (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam hal ini, perusahaan dengan ROA tidak akan melakukan efisiensi pajak dikarenakan adanya kemampuan perusahaan dalam membayarkan pajaknya sehingga tindakan *tax avoidance* mengalami penurunan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar pasti memiliki prospek baik dalam waktu yang panjang maka akan menarik perhatian fiskus secara kuat untuk

melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perusahaan tidak tertarik untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut didasari pada komite audit yang ada di perusahaan tidak menjamin dapat melakukan intervensi terhadap besarnya tarif pajak efektif perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan terhadap *tax avoidance*. Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyak komposisi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin efektif pengawasan baik dari manajemen dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker. (2012). The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53:391-411

Budiman, J & Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV*.

Cahyono, Andini & Raharjo. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan

Saran

Manajemen perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan *tax avoidance* yang diperbolehkan adalah sepanjang upaya tersebut dilakukan masih dalam kegiatan bisnis yang baik dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah sampel, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih luas. Dan juga diharapkan perhitungan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan menggunakan model lain sehingga dapat melihat adanya *tax avoidance* dengan sudut pandang yang berbeda.

Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance*. *Journal Of Accounting*, Vol.2 No.1.

Calvin Swingly & I Made Sukartha. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.1 ISSN 2302-8556.

Dewi & Jati. (2014). Pengaruh karakter Eksekutif, karakteristik perusahaan dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi*

- Universitas Udayana*, Vol 6.2 ISSN 2302-8556.
- Erly, Suandy. (2001). *Perencanaan pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Fadilla Rachmitasari. (2015). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Irawan dan A. Farahmita.(2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak.*Journal Universitas Indonesia*.
- Imam, Ghozali.(2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. (2014). *An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development*, 5 (18): 22-27.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of finansial economics*, 3(4), 305-360.
- Kasmir.(2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.*Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.Retrieved from www.ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emitentpp/peraturan-lain/6.IX.I.5.pdf.
- KNKG.(2006). *Pedoman UmumGood Corporate Governance*.Retrieved from www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.
- Kurniasih & Sari. (2013). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol 18 No.1 ISSN 1410-4628.
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maharani & Suardana. (2014). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.*E-journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 9.2 ISSN 2302-8556.
- Melisa Fadila.(2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. *JOM Fekon*, Vol.4 No.1.

- Merslythalia & Lasmana.(2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. *Do Corporate Governance Characteristics influence tax management?* *Journal of Corporate Finance* 16 (5): 703 -718.
- Muhammad Rizal. (2016). *Why Company Does Tax Avoidance? Evidence from a Manufacturing Company In Indonesia Stock Exchange*. *International Journal Of Business and Management Invention, Vol 5 Issue 5 ISSN 2319-8028*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Puspita.(2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.Skripsi.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahmi Fadhilah. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*.Skripsi.Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Swingly & Sukartha. (2015). Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,*Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10.ISSN 2302-8556.
- Waluyo, W. (2018) *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of The Indonesian Banking Company*. *The Accounting Journal of Binaniaga*.2 (02).

Website :

www.kompas.com diakses pada Juli 2018
www.idx.co.id diakses pada tanggal Januari s/d Mei 2018.
www.kemenkeu.go.id diakses pada Juli 2018.